



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.5 - JAKARTA PUSAT



Permohonan TTD

Yth. Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Surat Diterima	Dari	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
	Nomor Surat	14/SBKT/II/2026
	Tanggal Surat	09 Januari 2026
	Tanggal Diterima	13 Januari 2026
	Perihal	Penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 serta Konsep Surat Penyampaian Dokumen dimaksud kepada Menteri Perhubungan
Kode Penyimpanan	66	-

☒ Sekretaris Badan	☐ Kapusjak Sarana Transportasi	☐ Kapusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	☐ Kapusjak Lalu Lintas, Angkutan, & Transportasi	☐ Kapusjak Keselamatan & Keamanan Transportasi	☐ Analis Kebijakan Ahli Utama
☐ Kabag Perencanaan dan Keuangan	☐ Kabid. Jalan & Perketaapian	☐ Kabid Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda	☐ Kabid Transportasi Jalan & KA	☐ Kabid Transportasi Jalan & KA	
☐ Kabag Hukum, Humas dan Umum					
☐ Kabag SDM & Organisasi	☐ Kabid. Pelayaran & Penerbangan	☐ Kabid. Pelayaran & Penerbangan	☐ Kabid Pelayaran & Penerbangan	☐ Kabid Pelayaran & Penerbangan	
☐ Sespri / ADC					

Isi Disposisi

☐ Jadwalkan	☐ Untuk Ditindaklanjuti
☐ Harap Mewakili	☒ Untuk Diselesaikan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dipelajari
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Diketahui
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Disimpan
☐ Untuk Diskonsultasikan Dengan Saya	☐ Untuk Dikoordinasikan/Didiskusikan dengan
☐ Untuk Diproses Lanjut	

Catatan:

13/2
07



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 14/SBKT/II/2026

Yth : Kepala Badan Kebijakan Transportasi
Dari : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
Hal : Penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 serta Konsep Surat Penyampaian Dokumen dimaksud Kepada Menteri Perhubungan
Tanggal : 9 Januari 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini disampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 serta Konsep Surat Penyampaian Dokumen dimaksud Kepada Menteri Perhubungan untuk perkenan koreksi dan persetujuan Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan persetujuan Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi kami ucapkan terima kasih.

Rizal, S.T., M.A.
NIP 196906011992031003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

Nomor : KP.006/01/02/BKT/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Dokumen Perjanjian Kinerja Badan
Kebijakan Transportasi Tahun 2026

Jakarta, Januari 2026

Yth. Menteri Perhubungan RI,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026, guna mohon persetujuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan arahan lanjut Bapak Menteri Perhubungan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Irjen Pol Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

No	Keterangan	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Susanti	Ketua Tim Perencanaan		
2	Diperiksa	Fitri Indriastiwi	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan		
3	Disetujui	Rizal	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	01/24	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

Nomor : KP.006/01/02/BKT/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Dokumen Perjanjian Kinerja Badan
Kebijakan Transportasi Tahun 2026

Jakarta, Januari 2026

Yth. Menteri Perhubungan RI,

Sehubungan dengan penyelenggaran Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026, guna mohon persetujuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan arahan lanjut Bapak Menteri Perhubungan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Irjen Pol Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684



PERJANJIAN KINERJA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2026

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026. Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan Target Kinerja di Tahun 2026. Dokumen ini memuat Sasaran Program, Target Kinerja, dan Anggaran.

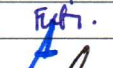
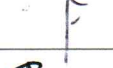
Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Jakarta, Januari 2026

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Irjen Pol. CAPT. HERMANTA, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

No.	Proses	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Dikonsep	Susanti, S.Psi., M.B.A.	Ketua Tim Perencanaan	
2.	Diperiksa	Dr. Fitri Indriastiwi, S.T., M.T.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Disetujui	Rizal, S.T., M.A.	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	
4.		Suranto, A.T.D., M.T.	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
5.		Novyanto Widadi, S.A.P., M.M., M.Tr.T.	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
6.		Supriyatno, S.E., M.Ak.	Plh. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	
7.		Ir. Bernadette Endah Sekar Mayashanti, M.S.P.	Kepala Pusat Keselamatan dan Keamanan Transportasi	

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026. Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan Target Kinerja di Tahun 2026. Dokumen ini memuat Sasaran Program, Target Kinerja, dan Anggaran.

Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Jakarta, Desember 2025

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Irjen Pol. CAPT. HERMANTA, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanta

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dudi Purwagandhi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Menteri Perhubungan

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

DUDI PURWAGANDHI

HERMANTA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dudi Purwagandhi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sebagai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET
1	2		3		4	5
1.	SP 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Strategis yang direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	IKP 1	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	87
2.	SP 2	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Transportasi	IKP 2	Indeks Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	85
3.	SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Indeks Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi	%	84

PROGRAM

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 13.800.674.000
Rp. 108.198.084.000

Disetujui,

Menteri Perhubungan

DUDI PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2025

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



HERMANTA